

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DESA ANGAN TEMBAWANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Oleh:
Ya' Ramdani Zulkarnain Awadi^{1*}
NIM : E1012161085

Isdairi,² Dhidik Apriyanto,²
*Email : yaramdani@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Angan Tembawang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Proses dari Charles O' Jones (dalam Joko Widodo, 2018, 89) yang menyatakan ada 3 tahapan dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan, yaitu : 1). Tahap Pengorganisasian, Kesimpulannya adalah masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh implementor dalam menentukan manajemen pelaksana kebijakan. 2). Tahap Interpretasi, kesimpulannya adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami isi dan tujuan pembentukan kampung keluarga berencana dan 3). Tahap Aplikasi, kesimpulannya adalah Banyaknya program-program kampung keluarga berencana yang tidak berjalan secara maksimal dikarenakan masyarakat tidak paham cara menjalankan program yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak program-program yang tidak berjalan sesuai dengan harapan yang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bagaimana menjalankan program-program yang sudah ada. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah Nomor 3.diharapkan implementor yakni pemerintah Desa Angan Tembawang dan Petugas Lini Lapangan Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Jelimpo melakukan jadwal pembinaan dan sosialisasi secara rutin minimal 1 bulan sekali atau lebih, agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengerti dan paham tentang bagaimana menjalankan program Kampung Keluarga Berencana dan juga agar program-program yang sudah ada dapat berjalan dengan baik kedepannya.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Keluarga Berencana

ABSTRACT

This thesis aims to find out how the process of the Family Planning Village Program runs in Angan Tembawang Village. The type of research was descriptive research with a qualitative approach. This study collected its data through interviews, observation and documentation. The theory used is the Process theory of Charles O' Jones (in Joko Widodo, 2018, 89) which states that there are 3 stages in the success of the policy implementation process, namely: 1). In the Organizing Stage, it can be concluded that the implementers are still lacking in coordination in determining the management of implementing policies. 2). In the Interpretation stage, it can be concluded that there are still many people who do not understand the contents and objectives of establishing the village family planning program and 3). In the Application stage, it can be concluded that many village family planning programs do not run optimally because the community does not understand how to run the existing programs. The results of this study indicate that there are still many programs that do not work as expected because there are still many people who do not understand how to run existing programs. This study recommends suggestions for the application stage. Implementors, namely the Angan Tembawang Village government and Field Line Officers for the Family Planning Village, Jelimpo Subdistrict, are expected to carry out regular coaching and socialization at least once a month or so, so that more people understand how to run the Family Planning Village program, and also so that the program - existing programs can run well in the future.

Keywords: Implementation, Program, Family Planning

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut tentang masalah pengendalian penduduk. BKKBN dalam hal ini diberi mandat oleh Pemerintah agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana. Kampung KB merupakan satu diantara kegiatan yang sesuai dengan instruksi Presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima masyarakat. Untuk itu segera dilakukan langkah

koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB.

Program KB tidak lagi hanya fokus pada upaya pengendalian jumlah penduduk, namun juga bagaimana melalui Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dari itu, KB dipandang masih dibutuhkan untuk memenangkan persaingan global. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementrian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholders*, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung KB) diseluruh kabupaten dan kota. Kampung KB dikelola dan

diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam pelaksanaan dilapangan Kampung KB berpegang pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN untuk menentukan bagaimana kampung KB dibentuk dan bagaimana proses berjalannya.

Kampung Keluarga Berencana Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak adalah Kampung KB Pertama kali yang dicanangkan di Kabupaten Landak pada tanggal 05 November 2018 oleh Bupati Kabupaten Landak, Kampung Keluarga Berencana atau disebut Kampung KB sangat diperlukan untuk membantu pembangunan Desa dalam aspek fisik dan non fisik, keberhasilan program KB dalam Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kampung KB, akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera untuk menuju kehidupan

yang lebih baik, sesuai dengan Slogan KB “ Ayo Ikut KB, 2 anak cukup “ dan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) demi terciptanya keluarga berkualitas sedini mungkin agar dapat menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berketahanan yang mampu bersaing.

Alasan peneliti mengangkat judul diatas karena program Kampung KB yang dijalankan di Desa Angan Tembawang masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Hal itu bias dilihat dari minimnya partisipasi masarakat dalam menjalankan program-program yang ada, dan tidak terpenuhinya salah satu dari tiga prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB.

3 prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB

1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat
2. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah
3. Partisipasi Masyarakat yang berpartisipasi Aktif

Suku yang mendiami Desa Angan Tembawang merupakan mayoritas dari Suku Dayak dengan pola kehidupan social satu kesatuan adat, Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Angan Tembawang adalah bertani dan berkebun, Jumlah Keluarga di Desa Angan Tembawang ini berjumlah 368 Kepala Keluarga, terbagi di 7 Dusun, dengan Jumlah Jiwa 1.497 Jiwa yang terdiri dari 774 pria dan 723 wanita, dan Rumah Tangga miskin berjumlah 185 Kepala Keluarga.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini terdiri dari :

1. Masih terdapat 185 dari 368 Kepala Keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
2. Program-program yang tidak berjalan diantaranya adalah Program Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Program Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera. Dimana partisipasi masyarakat dalam program tersebut hanya dibawah 30%

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada proses berjalannya Program Kampung KB yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar kebijakan dan Petunjuk Teknis Kampung KB sebagai dasar pelaksanaan dilapangan di Desa Angan Tembawang..

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana proses berjalannya Program Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo?.

5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti, menambah ilmu yang berguna bagi peneliti sendiri.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi-instansi dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menyempurnakan Program KB, khususnya pada DP2KBP3A Kabupaten Landak.

B. METODE PENELITIAN

1. Kebijakan Publik

Adapun definisi lain mengenai kebijakan publik menurut Friedrich dalam Wahab (dalam Joko Widodo, 2018:13) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Didalam bukunya *Public Policy Making* James Anderson (dalam Leo Agustino, 2012, 7-8) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka kebijakan tidak bisa diwujudkan (Joko Widodo, 2018, 85).

Donal Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Nugroho, 2015, 219) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengamsumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan konsisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak

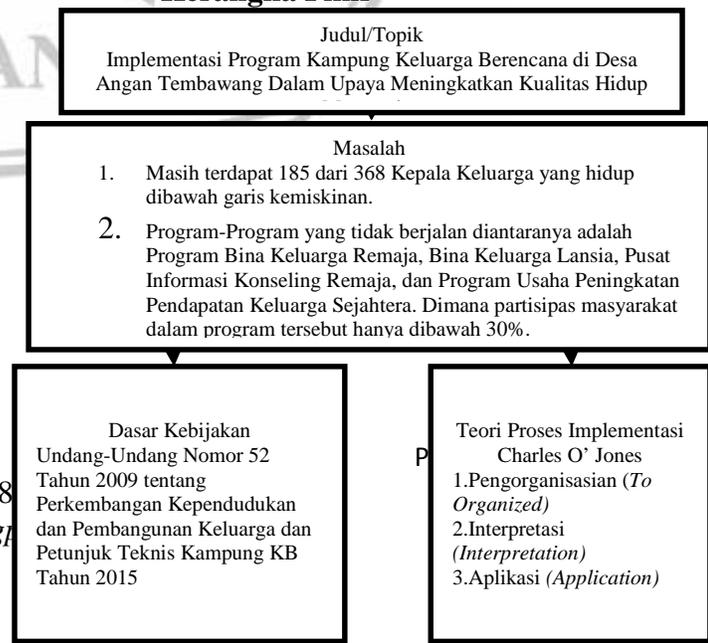
pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Untuk melihat bagaimana proses implementasi program kampung keluarga berencana di desa angan tembawang dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat digunakan teori proses yang dikemukakan oleh Charles O' Jones. Menurut Charles O' Jones (Joko Widodo, 2018, 89) aktivitas implementasi kebijakan (*policy implementation*) terdapat 3 macam, yaitu:

1. Pengorganisasian
2. Interpretasi
3. Aplikasi

Dari pemaparan tersebut, peneliti merumuskan alur pikir penelitian sebagai berikut:

Kerangka Pikir



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. . Sugiyono (2008, 15), mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan kembali kondisi nyata yang ada dilapangan. Melalui pendekatan kualitatif maka penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya secara rinci serta disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian penulis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan secara luas tentang berbagai fenomena yang terjadi dilapangan sehingga memiliki makna terhadap fenomena sosial tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur ditaman bacaan atau perpustakaan sebagai acuan untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang

ingin diteliti oleh peneliti lebih lanjut;

2. Melakukan pre survey atau penelitian pendahuluan selama 40 hari yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 10 Februari 2020 di Kota/Kabupaten yang telah ditentukan;
3. Pembuatan usulan penelitian;
4. Pengambilan data sekunder dan data primer yang kemudian secara bersamaan dilakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data dilapangan (wawancara atau observasi);
5. Membuat laporan penelitian (skripsi).

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Angan Tembawang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Dengan sasaran nya yakni Implementas Program Kampung Keluarga Berencana sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Desa Angan Tembawang sebagai Ketua Pelaksana Kampung KB.
2. Petugas Lini Lapangan Kampung KB di Desa Angan Tembawang.
3. Masyarakat Desa Angan Tembawang yang menjadi sasaran dalam pembentukan Kampung KB tersebut.

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan Member Check.

C. PEMBAHASAN

1. Pengorganisasian

Menurut Charles O Jones (1996 :311) organisasi merupakan perhatian paling penting karena dapat dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan, Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang di rancang. Setiap organisasi harus memiliki struktur tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas, Untuk memahami pengorganisasian dalam implementasi kebijakan kampung keluarga berencana dalam undnag-undang nomor 52 tahun 2009 , akan dibahas mengenai pelaksanaan kebijakan pedoman pelaksanaan kebijakan kampung kb, standar operasional serta sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan.

2. Interpretasi

Sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuan apabila terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar implementor kebijakan maupun sasaran kebijakan pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor penentu kebijakan berhasil atau tidak dalam mencapai suatu tujuan.

3. Aplikasi

Tahap aplikasi (dalam widodo,2010:94) merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan menjadi penyediaan barang dan jasa serta penerapan segala keputusan dan peraturan. Pelaksanaan kebijakan yang bersifat dinamis serta sangsi atau penindakan dalam sebuah permasalahan yang terjadi pada

keluarga menjadi aspek pada variabel aplikasi

D. SIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah di kemukakan peneliti maka, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dan pembahasan tersebut yaitu :

1. Tahap pengorganisasian dalam implementasi kebijakan kampung kb di Desa Angan Tembawang belum maksimal dikarenakan beberapa hal yaitu:
 - a. Dalam pelaksanaan kebijakan kurangnya pembinaan ,pelayanan,dan sosialisasi dari implementor, yaitu : Pemerintah Desa dan Petugas Lini Lapangan .
 - b. Untuk Stsnda Operasional (SOP) sendiri telah adanya SOP yang mengatur tentang waktu prosedur dalam pelaksanaan kebijakan untuk tugas dari masing masing implementor tersebut

- c. Sumberdaya keuangan sendiri ini berasal dari Anggaran Dana Desa.
 - d. Untuk penetapan manajemen dalam pelaksanaan kebijakan terdapat masih kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak yaitu Petugas Lini Lapangan dan Pemerintah Desa Angan Tembawang.
 - e. Untuk penetapan jadwal kegiatan tersebut dalam pelaksanaan belum ada jadwal rutin dari Petugas Lini Lapangan dalam menjalankan program-program Kampung KB, kegiatan hanya dilakukan jika memiliki anggaran untuk melaksanakannya.
2. Untuk Tahap interpretasi pada implementasi kebijakan Kampung KB di Desa Angan Tembawang kurang Optimal, karena :
- a. Pemahaman isi dan tujuan oleh kedua implementor kampung kb sudah memahami tetapi masyarakat belum atau kurang dalam memahami dengan isi dan tujuan tersebut .
 - b. Pembinaan dan sosialisasi sudah dilakukan oleh Petugas Lini Lapangan tapi tidak rutin dilakukan karena keeterbatasan dana yang tersedia, pembinaan dan sosialisasi penting dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan lancar dan efektif namun kenyataannya dilapangan jarang sekali pembinaan dan sosialisasi dilaksanakan.
3. Tahap aplikasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kampung kb di Desa Angan Tembawang belum optimal dikarenakan :
- a. Dalam penerapan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kampung KB, namun hasil yang diperoleh sejauh ini pembinaan dan sosialisasi dalam pelaksanaan masih belum efektif yang dilihat dari

masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti dengan program-program yang ada.

- b. Masih banyak program-program yang tidak berjalan sesuai dengan harapan yang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami isi dan tujuan dari program kampung KB.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang proses pelaksanaan Program Kampung KB dalam usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Angan Tembawang, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai karena masih terdapat 185 dari 368 kepala keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan program-program yang dibuat dalam pelaksanaan Program Kampung KB tidak berjalan dengan baik, seperti Program UPPKS yang hanya memiliki satu kelompok saja dalam pelaksanaannya.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas peneliti bermaksud memberikan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan keluarga berencana sebagai berikut:

a. Pengorganisasian

Diharapkan pemerintah daerah kabupaten landak juga ikut berperan dalam menjalankan implementasi kebijakan keluarga berencana dengan cara memberikan segala fasilitas untuk pemenuhan hak keluarga berencana agar menambah dukungan masyarakat.

b. Interpretasi

Diperlukan koordianasi yang lebih baik lagi antara pemerintah Desa Angan Tembawang dan Petugas Lini Lapangan dalam melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan mengembangkan program-program kampung KB yang ada di Desa tersebut.

c. Aplikasi

Melakukan jadwal pembinaan dan sosialisasi secara rutin 1 bulan sekali agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengerti dan paham tentang tujuan dibentuknya program Kampung KB dan juga agar program-program yang sudah ada dapat berjalan dengan baik kedepannya.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019 Cetakan ke1). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Cetakan ke 3 September 2010: Bayumedia Publishing.

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: MNC Publishing.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Media Persindo.

E. REFERENSI

Buku-Buku

Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

BkkbN. (2015). *Petunjuk Teknis Kampung KB*. BkkbN.

Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi

Ferawati. (2017). *Impelementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan*. (Skripsi, Universitas Kaltara, 2017).

Zultha, N. (2017). *Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Data – Data

Daftar Program-Program Kampung KB dari BKKBN

Daftar Jumlah Penduduk di Desa Angan Tembawang dari Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan Jelimpo

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kampung KB dari BKKBN Tahun 2015

